

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Syariati, Ali. *Imamah dan Umamah*, Terj. Afif Muhammad. Pustaka Hidayah, 1995.
- Ali Abdullah M, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen* (Jakarta:Prenanda Media Group, 2014).
- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.
- S. Attamini, Hamid. *Teori perundang-undangan Indonesia*”, makalah pada pidato upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI. Jakarta, 1992, 8.
- Mujiburohman, Dian Aris. *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : STPN Press, 2022.
- Syarif, Ibnu, Muja dan Zada Khumami. *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga, 2008.
- Sugiharto, Imawan, Imam Asmarudin dan Hyang Iman Kinasih Gusti, *“Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan Perancis*. PT. NEM, Pekalongan, 2022.
- Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung*, Fokusmedia, 2003.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Kansil Dan Charistine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta, 2000.
- Mahkamah Agung RI. *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

- Marwono. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Pekalongan : PT. NEM, 2021.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Asyiah, Nur. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1971.
- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian dan Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Sutarto. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. CV. Graha Printama Selaras, 2019.
- Khasanah, Uswatun. *Pengantar Mikroteaching*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

SKRIPSI

- Sudirman, Ahmad. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu.” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Lukman Afandi, Anang. “Negara dan Pluralisme (Studi Pemikiran Hasyim Muzadi Tentang Pluralisme Agama Di Indonesia Pasca Orde Baru).” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- R. Saragih, Bintan. Makalah Pembanding “Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance”, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI Jakarta 12-15 Oktober, 4.

Bayu Kesumo, Damar. "Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2023.

Mulyosudarmo, Soewoto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat." *Makalah* disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun 18-19 April 2000.

JURNAL

Agustinus J Sahetapy. "Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa (Good and Clean Governance)." *Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora* (2022)

Ahmad Asif Sardari, Ja'far Shodiq. "Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum." *Journal Of Islamic Family Law* 1:1 (2022) 15-17.

Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama. "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)." *Jurnal Mimbar Hukum* 30:2 (2018).

AL Prianto. "Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1:1 (2011).

Ayu Putriyanti. "Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 10:2 (2015).

Cecep Cahya Supena. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI 1945." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9:5 (2023)

Erna Susanti. "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa" (2018).

- Fransiska NG Purba, M. Mun'am Syaiful Huda. "Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme." *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1:3 (2022).
- Hendrik Salmon. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Ilmu Hukum.* " 16:4 (2023).
- Ipan Nurhidayat. "Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia." *Jurnal Education and Government.* 1:1. (2023): 41.
- Ismail Ramadhan. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1:3 (2013).
- Irwansyah dan Zenal Setiawan, " Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah" *Jurnal Cerdas Hukum.* 2:1 (2023).
- Made Hendra Wijaya. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Advokasi.* 5:2 (2015).
- M. Ikbar Andi Endang. " Direksi dan Tanggungjawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun*, 1:2 (2018).
- M. Zakaria. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assari'iyah)." *Jurnal Hukum Islam* 1:1 (2017).
- Melani Safitri dan Arif Wibowo. "Mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2:1 (2023).
- Muhammad Kamil Akbar. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Pionir* (2021), 354.
- Nadila Fitri Masloman. "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)." *Jurnal Unsrat* 10:3 (2022).
- Putra Astomo. " Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014), 64.

Tommy A. Legowo. "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah." *Jurnal Desentralisasi* 6:4 (2005).

Widyawati Boediningsih, Robert Wijaya Nugroho. "Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendukung Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Transformation of Mandalika* 2:3 (2021).

Wery Gusmansyah. "Trias Politika Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Al-Adalah Pemerintahan dan Politik Islam* 2:2 (2017).

Yulius. "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Peratun* 1:1 (2018).

ARTIKEL

Willa Wahyuni. 2022. Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia. Diakses 24 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>.

WAWANCARA

Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020)

Wawancara tanggal 27 Juni 2024 pukul 10.00 WIB, bersama Ibu Hj. Siti Maisyarah selaku Hakim PTUN Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 4Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344, Pasal 53 ayat (1).

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Semarang

